

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi SKPD.....	1
1.2 Struktur Organisasi SKPD.....	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA ESELON II	
2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II.....	16
2.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II.....	17
BAB III PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III	
3.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris.....	18
3.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Politik Dalam Negeri.....	19
3.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.....	20
3.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan.....	21
3.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Kewaspadaan Nasional.....	22
BAB IV PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV	
4.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian.....	23
4.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan.....	26
4.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Fasilitasi Organisasi Politik.....	28
4.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Pendidikan Budaya Politik.....	30
4.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Pembauran dan Kewarganegaraan.....	32
4.6 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.....	34
4.7 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.....	36
4.8 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kepercayaan.....	38
4.9 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.....	40
4.10 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.....	42
BAB V PENUTUP	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 04 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019 Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumus kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019, sebagai berikut:

- 1. Kepala;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Program dan Anggaran.
- 3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- 4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- 5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.



6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan



ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

2. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset serta pengelolaan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan persuratan;
- 2) Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan;
- 3) Melaksanakan urusan kearsipan;
- 4) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- 5) Melaksanakan urusan protokol;
- 6) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 7) Melaksanakan urusan pengelolaan aset;
- 8) Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2. **Sub Bagian Keuangan dan Aset;**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan aset, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan urusan pengelolaan keuangan;
- 2) Melakukan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
- 3) Melaksanakan pelaporan aset/barang inventaris;
- 4) Melakukan urusan akuntansi;
- 5) Melakukan urusan verifikasi dan pembukuan;
- 6) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. **Sub Bagian Program dan Anggaran**

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- 2) Melaksanakan penyiapan pengelolaan data informasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- 4) Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan kinerja;
- 5) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. **Bidang Politik Dalam Negeri**

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan



pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Politik Dalam Negeri***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan



penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

Rincian tugas Sub-Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas sebagai berikut :



- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugasnya ***Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa***, mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- b. Perumus kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ikadan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
membawahi :

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi,dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakanp enyiapan bahan penyusunan program di bidang ideologidan wawasan kebangsaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologidan wawasan kebangsaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi danwawasan kebangsaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidangideologi dan wawasan kebangsaan;



- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Rincian tugas Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang bela negara,pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakterbangsa;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang bela negara,pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakterbangsa; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan OrganisasiKemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan



Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat



- beragama dan penghayatan kepercayaan daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Rincian	tugas	Sub-Bidang	Organisasi
---------	-------	------------	------------

Kemasyarakatanmempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing,



tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan;

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub-Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Rincian tugas Sub-Bidang Penanganan Konflik adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang penanganan konflik;
- 5) Melaksanakan penyiapan penanganan konflik;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub system dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Keterkaitan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA ESELON II



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. M. FIRSADA, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	80%
1.1	Meningkatnya pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	15%
1.2	Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam penanganan masalah sosial dan kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	15%
1.3	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	15%
1.4	Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya peristiwa konflik sosial	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	80%
2.5	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	75%
2.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	72.25
2.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	72.25%

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN
(1)		(2)		(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	13,877,810,002.20	P APBD
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	143,346,000.00	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	12,132,676,886.20	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	11,684,000.00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	19,910,000.00	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	995,433,116.00	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	373,410,000.00	

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	201,350,000.00	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	796,916,600.00	P APBD
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	796,916,600.00	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp.	296,444,300.00	P APBD
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Rp.	296,444,300.00	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	149,395,000.00	P APBD
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	149,395,000.00	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	370,989,000.00	P APBD
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	370,989,000.00	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp.	243,777,250.00	P APBD
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	243,777,250.00	

Total Anggaran **Rp. 15,735,332,152.20**

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

BAB III

PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIE M. EFFENDI, S.STP.MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN
POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA**

ARIE M. EFFENDI, S.STP.MM
Pembina
NIP. 19800312 199810 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**Plt. KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI**

HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
Pembina
NIP. 19780710 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA,
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUZMIR, S. Sos. MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**KEPALABADANKESBANGDAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN
ORMAS**

NUZMIR, S. Sos. MM
Pembina
NIP. 19681117 199109 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK**

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. M. FIRSADA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	15%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 796,916,600	P APBD
Jumlah	Rp. 796,916,600	

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA




Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

ARIE M. EFFENDI, S.STP.MM
PEMBINA
NIP. 19800312 199810 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG KETAHANAN EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15%
2	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	15%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 149,395,000	P APBD
2 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 370,989,000	P APBD
Jumlah Rp. 520,384,000		

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS




Drs. M. FIRSADA, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19670515 198901 1 001

NUZMIR, S. Sos. MM
 PEMBINA
 NIP. 19681117 199109 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya koordinasi, Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 243,777,250	P APBD
- . . .	Rp. 243,777,250	

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK



HERMANSYAH S., SSTP, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	15.00%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 296,444,300.00	P APBD
- . .	Rp. 296,444,300.00	

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua ,

KEPALA BADAN KESBANG DAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
PEMBINA
NIP. 19780710 200501 1 012

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 BIDANG SEKRETARIAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90%
2	Meningkatnya layanan administrasi keuangan	Prosentase layanan administrasi keuangan	85%
3	Meningkatnya keselarasan laporan dan pengelola aset	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset	90%
4	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	75%
5	Meningkatnya layanan administrasi umum	Prosentase layanan administrasi umum	75%
6	Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	75%
7	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	60%

KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)	
1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	143,346,000.00	P APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	12,132,676,886.20	P APBD
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	11,684,000.00	P APBD
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	19,910,000.00	P APBD
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	995,433,116.00	P APBD
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	373,410,000.00	P APBD
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	201,350,000.00	P APBD
Jumlah	Rp	13,877,810,002.20	

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANG DAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Drs. M. FIRSADA, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS



HERMANSYAH S., SSTP, MH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19760710 199603 1 001

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMI MURNINGSIH, S.STP., MT**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NUZMIR, S. Sos. MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORMAS**

NUZMIR, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 19681117 199109 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA**

EMI MURNINGSIH, S.STP., MT

Pembina

NIP. 19830528 200112 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. TAVINA ARAFAH**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NUZMIR, S. Sos. MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORMAS**

NUZMIR, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 19681117 199109 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Dra. TAVINA ARAFAH

Penata Tk. I

NIP. 19650412 198603 2 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIFAI, SH**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG PENDIDIKAN BUDAYA
POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**

HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
Pembina
NIP. 19780710 200501 1 012

Pihak Pertama,

**KASUBBID PENDIDIKAN BUDAYA
POLITIK DAN PENINGKATAN
DEMOKRASI**

RIFAI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19660429 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**

HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
Pembina
NIP. 19780710 200501 1 012

Pihak Pertama,

**KASUBBID FASILITASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN
PARPOL**

HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
Pembina
NIP. 19780710 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MATHOFANI, S. Sos**

Jabatan : **KEPALA SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS

**KEPALA SUB. BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

MATHOFANI, S. Sos

Pembina Tk. I

Penata Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

NIP. 19661210 198703 1 010



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOHANES TRIMANSYAH**

Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN

YOHANES TRIMANSYAH

Penata Tk. I

NIP. 19680912 198909 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOLI PERANI, SH, MM**

Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

MOLI PERANI, SH, MM
Pembina
NIP. 19660713 199201 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BAGIAN BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M.Si**
Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIE M. EFFENDI, S.STP.MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG IDEOLOGI
WASBANG DAN KARAKTER
BANGSA**


ARIE M. EFFENDI, S.STP.MM
Pembina
NIP. 19620918 199203 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG BELA NEGARA DAN
KARAKTER BANGSA**


Drs. FARDINANSYAH, M.Si
Pembina
NIP. 19680103 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BODI SURANTO, SE. MM**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIE M. EFFENDI, S.STP.MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

ARIE M. EFFENDI, S.STP.MM
Pembina
NIP. 19620918 199203 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BODI SURANTO, SE. MM
Pembina
NIP. 19640310 198503 1 010



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG
KEWASPADAAN DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN**

AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM
Pembina
NIP. 19690928 198912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FEBRI FERDYAN, S. IP**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK**

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG
PENANGANAN KONFLIK**

FEBRI FERDYAN, S. IP
Penata
NIP. 19810203 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyusunan program kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Raker penyusunan program kerja sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	2 kali
2	Terlaksananya pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Raker FPK	2 kali
3	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Sosialisasi Bela Negara 2. Upacara Hari Bela Negara 3. Rakor Multikultural 4. Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan	5 kali 1 kali 1 kali
4	Tersusunnya dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Monev bidang bela negara dan karakter bangsa	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

KEPALA SUBBID BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA



ARIE M. EFFENDI, S.STP.MM

Pembina

NIP. 19800312 199810 1 001



Drs. FARDINANSYAH, M. Si

Pembina

NIP. 19680103 199603 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBID IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyusunan program kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Raker penyusunan program kerja sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	2 kali
2	Terlaksananya pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Raker PPWK	2 kali
		2. Raker GNRM	2 kali
3	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Sosialisasi GNRM	1 kali
		2. Revitalisasi dan aktualisasi Pancasila	3 kali
		3. Rakor Wasbang, Karakter Bangsa dan Bela Negara	1 kali
4	Tersusunnya dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen monev bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

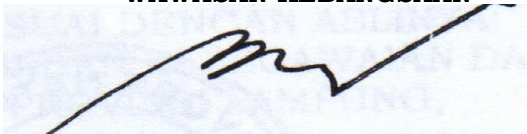
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA



ARIE M. EFFENDI, S.STP.MM
Pembina
NIP. 19800312 199810 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBID IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN



BODI SURANTO, SE. MM
Pembina
NIP. 19640310 198503 1 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 jumlah rapat Tim Pengawas Ormas 2 jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 3 jumlah Dialog Interaktif Organisasi Masyarakat	3 kali 3 kali 1 kali
2	Tersusunnya dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas	Jumlah dokumen Monev Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORMAS**



NUZMIR, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 19681117 199109 1 001

**KEPALA SUBBID ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**



Dra. TAVINA ARAFAH

Penata Tk. I

NIP. 19650412 198603 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pembinaan Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 jumlah Rapat Timdu P4GN Provinsi Lampung 2 jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba 3 jumlah Rapat Tim FKUB 4 jumlah Pembinaan Pondok Pesantren 5 jumlah Rakor FKUB Kab/Kota 6 jumlah FGD Kerukunan Umat Beragama	3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali
2	Tersusunnya dokumen laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA

KEPALA SUBBID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA




NUZMIR, S. Sos. MM

EMI MURNINGSIH, S.STP., MT

Pembina

Pembina

NIP. 19681117 199109 1 001

NIP. 19830528 200112 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pemantapan Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Raker FKDM Provinsi Lampung	3 kali
2	Terlaksananya kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Rapat Stabilitas dan Kewaspadaan Dini di Daerah 2. Rapat Forkopimda	4 kali 1 kali
3	Tersusunnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	1 dokumen

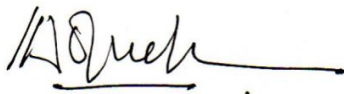
Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM
Pembina
NIP. 19690928 198912 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Raker RAD-PKS	3 kali
2.	Tersusunnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi bidang Penanganan Konflik	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

**KEPALA SUB. BIDANG PENANGANAN
KONFLIK**



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

FEBRI FERDYAN, S. IP

Pembina Tk. I

Penata

NIP. 19760710 199603 1 001

NIP. 19810203 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBID PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya raker penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	jumlah raker penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Budaya Politik dan peningkatan demokrasi	1 kali
2	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah Raker Kelompok Kerja Bidang Pendidikan Budaya Politik dan peningkatan demokrasi	1 kali
3	Terlaksananya kegiatan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. FGD Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung 2. Rapat Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung	1 kegiatan 1 kegiatan
4	Tersusunnya Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monev Bidang Pendidikan Budaya Politik dan peningkatan demokrasi	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



HERIZA KURNIAWAN, SH, M. IP

Pembina

NIP. 19780710 200501 1 012

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBID PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI



RIFAL, SH

Penata Tk. I

NIP. 19660429 199003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBID FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN
PARPOL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya raker penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	jumlah raker penyusuna program kerja Bidang Pendidikan Budaya Politik dan peningkatan demokrasi	1 kali
2	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah Raker Kelompok Kerja Bidang Pendidikan Budaya Politik dan peningkatan demokrasi	1 kali
3	Terlaksananya kegiatan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rapat Verifikasi Administrasi Bantuan kepada Partai Politik	6 kegiatan
4	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Bimtek LPJ Bantuan kepada Partai Politik 2. Pendidikan Politik dan Kaderisasi 3. Rakor Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
5	Tersusunnya Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monev Bidang Bidang Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Parpol	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



HERIZA KURNIAWAN, SH, M. IP

Pembina

NIP. 19780710 200501 1 012

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBID FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARPOL



HERIZA KURNIAWAN, SH, M. IP

Pembina

NIP. 19780710 200501 1 012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	tersusunnya dokumen perencanaan	jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen
2	tersusunnya dokumen RKA-SKPD tepat waktu	jumlah dokumen RKA-SKPD tepat waktu	4 dokumen
3	tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja tepat waktu	14 dokumen

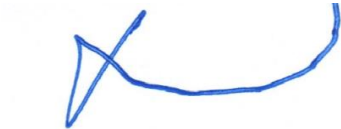
Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS

**KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM
DAN ANGGARAN**



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

YOHANES TRIMANSYAH

Pembina Tk. I

Penata Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

NIP. 19680912 198909 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	12 bulan
2	terlaksananya pemberian hibah uang kepada badan/lembaga	Jumlah badan/lembaga penerima hibah uang	39 lembaga
3	tersusunnya dokumen akuntansi	Jumlah dokumen akuntansi	12 dokumen
4	tersusunnya dokumen keuangan	jumlah dokumen keuangan	18 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS

KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

MOLI PERANI, SH, MM

Pembina Tk. I

Pembina

NIP. 19760710 199603 1 001

NIP. 19660713 199201 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	tersusunnya dokumen barang dan pengelolaan aset milik daerah	Jumlah dokumen barang dan pengelolaan aset milik daerah	8 dokumen
2	terlaksananya ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	30 orang
3	tersedianya peralatan listrik kantor	jumlah unit peralatan listrik kantor yang tersedia	200 unit
4	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 unit
5	tersediannya peralatan rumah tangga	jumlah unit penyediaan peralatan rumah tangga	100 unit
6	tersediannya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah layanan fasilitasi kunjungan tamu	12 kali
7	tersedianya barang cetak dan penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	12 bulan
8	tersedianya bahan/material	Jumlah penyediaan bahan/material	12 bulan
9	tersedianya koordinasi dan konsultasi	jumlah koordinasi dan konsultasi	60 kali
10	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang ditingkatkan	12 bulan
11	tersedianya layanan umum kantor	Jumlah bulan layanan jasa umum kantor	12 bulan
12	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit
13	tersedianya jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah ruang pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8 ruang
14	tersedianya jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 unit

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN



MATHOFANI, S. Sos

Penata Tk. I

NIP. 19691117 199003 1 006



BAB V

PENUTUP

VI.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, merupakan implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

Pelaksanaan program kerja telah memberikan peningkatan dalam berbagai bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat hambatan namun tidak mengganggu proses pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2021

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001